

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Indra Sulistyaningsih, Haryanto ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence and analyze the influence of Own Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on Allocation of Capital Expenditures based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The sample are 29 districts and 6 cities in Central Java Province which submitted Local Government Financial Reports (LKPD) during period of 2013 to 2017. The sample was chosen using a census method and obtained observations of 175 samples, after checking there are outlier data as 6 so the total final sample as many as 169 samples. The analytical method in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS software. The results of this study indicate that Own Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) have a significant positive effect on Allocation of Capital Expenditures.

Keywords: Own Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures, LKPD

PENDAHULUAN

Era reformasi tahun 1998 telah membawa pengaruh hampir pada semua sektor kehidupan. Termasuk pada sektor publik, pemerintah turut ikut serta melakukan reformasi dalam bidang manajemen keuangan, yaitu tentang hak, otoritas, dan kewajiban pemerintah daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diperlukan adanya penggantian perundang-undangan. Sebagai pembaharuan kebijakan tersebut, kini telah diterbitkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dengan menimbang penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Prinsip desentralisasi menyiratkan bahwa tata kelola dan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Suryantini, dkk 2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Penganggaran modal dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap fasilitas dan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kepentingan politik badan legislatif yang terlibat dalam persiapan proses penganggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat (Suryantini, dkk 2017).

Pemerintah pusat dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat telah memberi transfer dana berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan untuk kekurangan anggaran pendanaan diharapkan pemerintah daerah mampu menggali melalui pendanaan sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada praktiknya, transfer dana dari pemerintah pusat

¹ Corresponding author

menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Prakosa, 2004).

Menurut Halim (dalam Sumarmi, 2008) daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengindikasikan tingkat kemandirian yang rendah pula, sehingga dituntut untuk mengubah struktur belanja menjadi lebih kuat. Alokasi belanja modal yang selama ini dianggarkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Namun selama ini belanja daerah lebih diutamakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Fluktuasi komposisi belanja merupakan salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan tingkat kepercayaan publik. Fluktuasi atau pergeseran ini diharapkan mampu untuk meningkatkan investasi modal pada daerah (Sumarni, 2008).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan *agent* dan *principal*. Menurut Halim dan Abdullah (2006) teori agensi mengaitkan hubungan antara prinsipal dengan agen yang berasal dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi, dan organisasi. Halim dan Abdullah (2006) menjelaskan bahwa dalam sudut pandang pemerintahan daerah hubungan keagenan dapat terjadi antara eksekutif dengan legislatif dan legislatif dengan publik. Hubungan keagenan antara eksekutif yaitu kepala daerah sebagai pihak agen dengan legislatif yaitu DPRD sebagai prinsipal. Sedangkan hubungan keagenan antara legislatif sebagai agen dan publik sebagai prinsipal terjadi karena publik atau masyarakat memilih DPRD sebagai perwakilan dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian anggaran belanja daerah.

Eksekutif yang bertindak sebagai agen cenderung mengetahui informasi lebih jika dibandingkan dengan legislatif dibandingkan dengan legislatif (Halim dan Abdullah, 2006). Eksekutif dapat melakukan *moral hazard* berupa *budgetary slack*. Hal tersebut merupakan suatu keadaan dimana terjadinya perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dengan estimasi dengan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksi. Pihak eksekutif melakukan hal tersebut dengan cara mengestimasi pendapatan lebih rendah dan belanja lebih tinggi. Sedangkan pihak legislatif yang bertindak sebagai prinsipal atas eksekutif mampu melakukan *moral hazard* dengan cara membuat kebijakan yang menguntungkan pihak legislatif dan seolah-olah kebijakan tersebut atas kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

2. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya (Sugiarthi dan Supadmi, 2014). Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk didalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Seluruh pendapatan daerah yang berasal dari transfer dana pemerintah pusat dan yang dihasilkan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya lebih banyak dialokasikan pada anggaran belanja daerah dalam bidang fasilitas maupun infrastruktur publik dan kebutuhan pemerintah yang lebih produktif. Namun kenyataannya pendapatan daerah tersebut seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kurang menunjang pertumbuhan ekonomin atau pada sektor belanja rutin yang kurang produktif. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.

3. Teori Anggaran Sektor Publik

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, anggaran menjadi alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran menjadi salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan sehingga dapat mencapai tujuan bernegara (Bastian, 2014).

Penganggaran merupakan proses yang dilakukan dalam tahap mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan anggaran sendiri diartikan sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik memuat rencana kegiatan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja, yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2009).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al, 1986 (dalam Prakosa, 2004) menyatakan bahwa hipotesis mengenai pengaruh pendapatan daerah terutama pajak daerah terhadap anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan *tax spend hyphotesis*. Maka perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan alokasi belanja pemerintah daerah, atau perubahan pendapatan dilakukan sebelum perubahan pengeluaran (Prakosa, 2004). PAD mencakup semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya potensial dari daerah tersebut. Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah mempunyai proporsi terbesar dalam pembentukan PAD, sehingga ada asumsi bahwa PAD identik dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah ini kemudian akan dialokasikan pada Belanja Modal. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, namun pada kenyataannya masih ada beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber utama pendanaan pemerintahannya dari Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum. Besaran saldo dalam DAU dipastikan ditujukan untuk meningkatkan saldo Pendapatan Daerah (Suryantini, dkk 2017).

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sumber saldo fiskal yang kedua setelah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. DAK diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya kegiatan atau program khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal (Suryantini, dkk 2017).

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pendapatan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari data Laporan Realisasi APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sehingga untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PAD} \\ &= \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} \\ &+ \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} \\ &+ \text{Lain - lain PAD yang sah} \end{aligned}$$

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian ini dapat dilihat dalam data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada pos Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum dialokasikan sebagai berikut:

-
- $\text{Alokasi DAU}^{kab/kota} = 90\% \times 26\% \times \text{Penerimaan Dalam Negeri} \times \text{bobot}^{kab/kota}$
 - $\text{Alokasi DAU}^{prov} = 10\% \times 26\% \times \text{Penerimaan Dalam Negeri} \times \text{bobot}^{prov}$
-

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada pembangunan kegiatan investasi, pengadaan, perbaikan, dan pengadaan fasilitas fisik pendukung (Suryantini, dkk 2017). Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian ini dapat dilihat di pos Dana Perimbangan dalam data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Perolehan Dana Alokasi Khusus diberikan dengan beberapa kriteria yaitu:

-
- **Kriteria umum** : berdasarkan kemampuan keuangan daerah
 $\text{Alokasi DAK} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja PNS Daerah}$
 - **Kriteria khusus** : berdasarkan peraturan perundang undangan yg mengatur penyelenggaraan khusus dan karakteristik daerah
 - **Kriteria teknis** : berdasarkan indikator2 kegiatan khusus yg akan didanai dari DAK
-

4. Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2013) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal juga diasumsikan sebagai pengeluaran yang dihabiskan dalam rangka pembentukan modal dalam periode lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah usia manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Suryantini, dkk 2017). Dalam penelitian ini Belanja Modal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Belanja Daerah dapat dihitung dengan mengukur:

Belanja Modal

= *Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin*
+ *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*
+ *Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan*
+ *Belanja Aset Tetap Lainnya*
+ *Belanja Aset Lainnya*

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2017. Pengambilan populasi tersebut dengan ketentuan setiap Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan tercantum data-data mengenai PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dari tahun 2013 hingga 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, sehingga seluruh populasi tersebut merupakan sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dianalisis menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2017 tersebut diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Metode Analisis**1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menjelaskan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013).

2. Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $>0,05$ maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2018). Nilai Durbin Watson merupakan dasar untuk menentukan apakah telah terjadi autokorelasi atau tidak.

Uji Heterokedasitas

Cara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SREID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diasumsikan bahwa data yang diteliti tidak terdapat heterokedasitas.

Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan dengan cara menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Nilai . Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai VIF dan nilai Tolerance menjadi ukuran yang menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas terjadinya multikolinieritas adalah nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance $> 0,10$. Apabila tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat terdapat gejala multikolinieritas.

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel penelitian berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Data yang terkait diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan persamaan rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = *Intercept*

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₃ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

b₁ = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b₂ = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

b₃ = Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = Koefisien error

Uji Signifikan F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Sehingga dengan uji F dapat menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Signifikan T

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian dengan uji t. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R² adjusted) antara nol dan satu atau $0 < R^2 < 1$. Jika R² mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik. Sedangkan bila nilai R² mendekati 0, berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 35 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2017. Akan tetapi total sampel tersebut harus dikurangi sebanyak 6 data yang telah diuji secara statistik sebagai data outliers sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 169 sampel.

Statistik Deskriptif

Penelitian ini memiliki hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel yang ditunjukkan pada tabel 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
N Valid	175	175	175	175
Mean	289.371.677.834,34	895.154.049.942,86	146.591.212.581,19	318.735.335.372,60
Std. Deviation	213.362.399.448,17	240.646.968.236,97	120.363.936.272,56	175.400.682.311,696
Minimum	42.622.520.501	358.331.867.000	3.750.100.000	43.552.342.192
Maximum	1.791.886.378.674	1.398.539.653.000	483.813.447.054	1.275.359.088.966

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, nilai residual yang ditunjukkan pada awalnya tidak terdistribusi normal, kemudian dilakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah ketidaknormalan pada nilai residual tersebut. Cara yang dilakukan dalam penelitian ini agar nilai residual menjadi terdistribusi secara normal adalah dengan mendeteksi data outliers menggunakan SPSS dari seluruh sampel yang digunakan. Setelah mengeluarkan data outliers, sebanyak 6 data kemudian variabel dependen yaitu alokasi Belanja Modal tersebut diuji normalitas dengan menggunakan rumus LOG untuk mengetahui nilai residual akhir.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00508405
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,050
	Negative	-0,061
Kolmogorov-Smirnov Z		0,792
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,557

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil pengujian data maka dapat dilihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,557 dengan probabilitas signifikansi 0,557. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,767 ^a	0,588	0,581	0,0051301	2,139

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson yang ditunjukkan dalam tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 2,139. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah observasi (N) sebanyak 169, dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3. Maka berdasarkan tabel DW

didapatkan nilai dL sebesar 1,7124 dan nilai du 1,7846. Dengan demikian diperoleh $du < d < 4-du$, yaitu $1,7846 < 2,139 < 2,2154$. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	0,981	0,039			25,079	0,000		
PAD	0,009	0,003	0,213		3,633	0,000	0,724	1,382
DAU	0,021	0,004	0,355		5,824	0,000	0,671	1,490
DAK	0,008	0,001	0,365		5,672	0,000	0,602	1.661

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan pengujian multikolinieritas pada data yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, dapat dianalisis bahwa hasil nilai *tolerance* lebih dari 0,100 dan semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel penelitian menunjukkan tidak terjadi korelasi antar variabel dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedasitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,027	0,026			1,053	0,294
PAD	-0,002	0,002	-0,129		-1,419	0,158
DAU	7,998E-5	0,002	0,003		0,034	0,973
DAK	0,000	0,001	0,023		0,236	0,814

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada semua variabel independen diatas berada daiatas 0,05 (5%) sehingga dapat diartikan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,981	0,039			25,079	0,000
PAD	0,009	0,003	0,213		3,633	0,000
DAU	0,021	0,004	0,355		5,824	0,000
DAK	0,008	0,001	0,365		5,672	0,000

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang ditunjukkan dalam tabel 4.7, diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = 0,981 + 0,009X_1 + 0,021X_2 + 0,008X_3 + e$$

Persamaan tersebut mengandung pengertian yaitu:

Nilai Konstanta pada penelitian ini sebesar 0,981 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen yang dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$, $X_3=0$), maka alokasi Belanja Modal tiap daerah adalah sebesar 0,981. Koefisien regresi PAD bernilai positif sebesar 0,213 terhadap variabel dependen. Koefisien regresi DAU bernilai positif sebesar 0,355 terhadap variabel dependen. Koefisien regresi DAK bernilai positif sebesar 0,008 terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,767 ^a	0,588	0,581	0,0051301

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan dalam tabel 4.8 dapat dilihat besarnya nilai *adjusted R square* adalah 0,581 atau sama dengan 58,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 58,1% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Alokasi Umum (DAU), dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK). sedangkan sisanya variasi Belanja Modal dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Uji F

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,006	3	0,002	78,620	,000 ^a
Residual	0,004	165	0,000		
Total	0,011	168			

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Berdasarkan hasil uji statistik F yang ditunjukkan dalam tabel 4.9, dapat dilihat bahwa hasil F_{hitung} adalah 78,620 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $78,620 > 2,66$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Uji T

Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,981	0,039		25,079	0,000
PAD	0,009	0,003	0,213	3,633	0,000
DAU	0,021	0,004	0,355	5,824	0,000
DAK	0,008	0,001	0,365	5,672	0,000

Sumber: data olahan spss 16, 2018

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini yang memiliki output yaitu sebagai berikut:

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai t_{hitung} 3,633 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,97393 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Dodik Siswanto (2012) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh dalam pengalokasian anggaran Belanja Modal dan Saptaningsih Sumarni (2008) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah untuk digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pembelanjaan daerah.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel DAU mempunyai nilai t_{hitung} 5,824 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,97393 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum diindikasikan menjadi faktor yang sangat menentukan besarnya Belanja Modal. Hasil tersebut juga didukung oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menjelaskan bahwa secara empiris jumlah Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat secara empiris mempengaruhi besarnya jumlah Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel DAK mempunyai nilai t_{hitung} 5,672 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,97393 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Santi Suryantini, Ica Rika Candraningrat, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan Belanja Modal harus didasarkan pada peningkatan permintaan untuk Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi pemerintahan untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus sudah dapat dioptimalkan namun masih adanya ketergantungan yang signifikan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka jumlah pengalokasian anggaran Belanja Modal juga akan meningkat begitu juga sebaliknya, 2) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat begitu juga sebaliknya, 3) Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum yang diterima akan meningkatkan juga alokasi Belanja Modal begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut menunjukkan peningkatan maupun penurunan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan akan mengakibatkan peningkatan maupun penurunan pada Belanja Modal. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada dana yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dalam menentukan alokasi Belanja Modal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: 1) Variabel independen yang dipakai dalam penelitian hanya terbatas pada tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, 2) Hasil penelitian hanya menggambarkan sebagian tingkat kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak mencakup pengamatan tingkat kemandirian di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, 3) Rentang penelitian yang dilakukan hanya menggunakan 5 tahun pengamatan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pada pengalokasian Belanja Modal dengan periode yang lebih panjang dan hasil pengukuran menjadi kurang akurat.

Berdasarkan pertimbangan dari kesimpulan, dan keterbatasan yang diuraikan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah cakupan variabel, rentang waktu, maupun daerah kabupaten atau kota khususnya yang berada di luar Pulau Jawa agar hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: 1) Selaku penyelenggaraan pelayan publik agar dapat terus menggali sumber potensi-potensi pendapatan daerah sendiri secara lebih optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mampu meningkatkan mutu dari pelayanan publik kepada masyarakat di daerah, 2) Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan secara efektif dan efisien transfer dana dari pemerintah pusat guna menunjang peningkatan kualitas dari pelayanan publik, 3) Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan pengalokasian anggaran Belanja Modal dengan memprioritaskan dana yang dimiliki agar dapat berguna bagi kepentingan umum dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana di daerah.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. *HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Agustus 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN DAERAH*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. 2014. "Lingkup Akuntansi Sektor Publik." dalam *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, 1–52. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi VII. Semarang : Badan Penerbit – UNDIP.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David, dan Priyo Hari Adi. 2007. *HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Haryanto. 2008. *PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH PENDEKATAN KINERJA*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI*. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1 (2014):79-92.
- Kristiono, Natal. 2016. *OTONOMI DAERAH*. SEMARANG: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Kusnandar, dan Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli*

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Mardiasmo. 2009. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Pemerintah Daerah. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY)*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8, 101-118.
- Sarjo, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarmi, Saptaningsih. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta*. Akmenipa UPY, Vol 4, 2009.
- Suryantini, Ni Putu Santi, Ica Rika Candraningrat, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi. 2017. *THE INFLUENCE OF DAU (GENERAL ALLOCATION FUND) AND DAK (SPECIAL ALLOCATION FUND)*. Economics & Business Solutions Journal, Vol 1, Nomor 2, 2017.
- Wiley, John dan Sons, Inc. 2013. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2002. *Seri Keuangan Publik: HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.